Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum

Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar

Fakultas Hukum Universitas Terbuka

elizabeth@unja.ac.id

Abstract

Violence against women is a crime that almost occurs in all cultures and countries that occur both in public and private spaces. Based on Komnas Perempuan's annual records, almost all regions of Indonesia committed these crimes. The most common violence is sexual violence. In Jambi, during the period of 2017-2019 there were several cases of rape and sexual abuse and other violence. And what's interesting is that some cases have other dimensions of action that are actually important to study how the application of the law to the event. This research is empirical, because it examines facts or legal events by then examining how the application of the law. From the results of the study showed that, the type of sexual violence decided by the judge, generally related to the crime of rape and molestation as contained in the Criminal Code. In the imposition of sanctions, none of the judges has given the maximum sentence, even though the trial proved guilty. In the case of the application of the law, law enforcers in this case prosecutors and judges guide the Criminal Code, which indeed includes rape and molestation arrangements. Although in reality the actual cases have different dimensions of action (more than one) and deserve to be given threats that are in accordance with the perpetrators' actions. In this case, there is a legal vacuum that actually results in uncertainty in fulfilling a sense of justice for women (victims). So it is important to reform the provisions regarding sexual violence by adopting the value of protecting women and accommodating the wisdom principle of the Indonesian nation namely Pancasila and accommodating the principles of gender justice.

Keywords: Violence against women; Law Implementation

A. Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan kejahatan yang memiliki dimensi perbuatan yang luas dan dapat terjadi pada ruang public maupun ruang privat.

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan persentasi angka kekerasan terhadap perempuan (selanjutnya disebut KtP) setiap tahun meningkat, seperti yang tertera dalam grafik di bawah ini:

Keterangan: Diagram berdasarkan data dari Badilag (Badan Peradilan Agama) dan data kuesioner yang diterima Komnas Perempuan dari tahun ke tahun

KtP dalam diagram terdiri dari berbagai macam bentuk kekerasan dan terjadi dari ranah publik maupun privat. Adapun segi bentuk kekerasan, secara umum terdapat beberapa bentuk seperti kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan seksual. Berkaitan dengan bentuk kekerasan, hal yang patut mendapat perhatian adalah bahwa justru

“ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998-2013):

1. Perkosaan
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
3. Pelecehan seksual
4. Eksploitasi seksual
5. Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual
6. Prostitusi paksa
7. Perbudakan seksual
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
9. Pemaksaan kehamilan
10. Pemaksaan aborsi
11. Pemaksaan kontrasespsi dan sterilisasi
12. Penyiksaan seksual
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan
15. Kontrol seksual

Kelima belas bentuk kekerasan seksual ini bukanlah daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum kita kenali akibat keterbatasan informasi mengenainya”

Sejalan dengan hal di atas, kekerasan seksual merupakan kekerasan yang paling sering terjadi pada perempuan. Kerentanan perempuan menjadi korban kekerasan seksual disebabkan banyak faktor.

“Secara sosiologis, dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat, semua warga negara berpartisipasi penuh atas terjadinya kejahatan sebab masyarakat dipandang sebagai sebuah system kepercayaan yang melembaga (system of institutionalized trust). Tanpa kepercayaan itu, kehidupan social tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional. Bagi korban kejahatan dengan terjadinya kejahatan yang menimpa dirinya tentu akan menghancurkan system kepercayaan tersebut.

Isu kekerasan seksual terhadap perempuan bukan saja merupakan masalah di Indonesia, namun juga menjadi masalah di berbagai dunia. Jane Roberts Chapman (pendiri Center Woman Policy Studies) dalam Harkristuti Harkrisnowo “mengungkapkan bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan secara

universal terjadi di semua budaya dan negara.”

Menurut Ani Purwanti, “Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Subyek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang sering dianggap korban lemah.” Lebih lanjut “Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan universal. Tidak hanya endemis tetapi juga pervasive dan berulang-ulang terjadi dimana-mana dalam kurun waktu yang sangat panjang”

Di Indonesia, berdasar data dalam laporan Komnas Perempuan menyatakan:

“pada ranah public dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3915 kasus. 64% kekerasan terhadap perempuan di ranah public atau komunitas adalah kekerasan seksual yaitu pencabulan (1.136), perkosaan (762) dan Pelecehan Seksual (394). Sementara itu persetubuhan sebanyak 156 kasus. Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang banyak digunakan kepolisian dan pengadilan karena dasar hukum pasal-pasal yang ada dalam KUHP untuk menjerat pelaku.”

Berkaitan dengan kuantitas kekerasan seksual, ada hal yang perlu menjadi perhatian. Tingginya angka kekerasan seksual menunjukkan bahwa banyaknya kasus yang terjadi, menandakan tingginya kesadaran korban atau pelaku untuk melapor dan terbukanya akses informasi bagi korban dan keluarga untuk memperjuangkan keadilan. Bahwa rendahnya angka kekerasan seksual bukan berarti tidak terjadi kekerasan seksual, kemungkinan bahwa tidak terungkapnya kasus tersebut ke proses hukum, kurangnya bukti dan perbuatan yang dilakukan pelaku tidak tergolong ke dalam kejahatan kesusilaan yang diatur dalam KUHP atau sebab internal korban, seperti beban mental korban maupun keluarga sehingga tidak ingin memproses secara hukum.

Dalam KUHP, pengaturan kekerasan seksual yang sering diancamkan kepada pelaku adalah pencabulan dan persetubuhan. Kedua perbuatan ini, merupakan jenis perbuatan yang sering digunakan penegak hukum dalam menjerat pelaku. Namun apakah kekerasan seksual hanya mencakup perbuatan itu saja? Dalam realitas yang ada, harus diakui bahwa pengungkapan kekerasan seksual terhadap perempuan sebuah dilematis, sebab karakteristik tindak pidana kekerasan seksual berbeda dengan karakteristik tindak pidana yang

lain. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang menyangkut nilai nilai kehormatan dan penghargaan diri perempuan. Dimensi perbuatan yang tidak selalu diatur dalam legalitas sebuah hukum, namun kerap terjadi. Dari sisi kriminalisasi, misalnya tindak pidana kekerasan seksual yang ada saat ini belum mencakup beberapa perbuatan yang seharusnya juga tergolong tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, jika ditinjau dari penjatuhan pidana, penting mencermati bagaimana persepsi hakim dalam memberikan hukuman terhadap pelaku.

Di kota Jambi, tidak berbeda dengan kota kota lain di Indonesia, kekerasan seksual terhadap perempuan juga terjadi. Dari beberapa kasus yang penulis teliti di Pengadilan Negeri Jambi dari kurun waktu 2017-2019 dilihat dari segi kuantitas tidaklah menunjukkan angka yang fantastis, namun kembali lagi melihat persoalan kekerasan seksual bukan persoalan angka. Kejahatan ini bukan seperti tindak pidana yang lain, namun bagaimana mencermati karakteristik perbuatan dan menyoroti hukum dalam menjalankan fungsinya.

B. Metode Penelitian,

Masalah kekerasan seksual merupakan kejahatan yang dapat terjadi dalam lingkup publik maupun privat, dan juga terjadi dalam tataran relasi

gender. Dalam sebuah jurnal Irwan Abdullah, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Dyah Pitaloka:

“menyatakan Perempuan yang secara langsung menunjuk kepada salah satu dari dua jenis kelamin, dalam kehidupan social selalu dinilai sebagai the other sex yang sangat menentukan mode representasi social yang tampak dari pengaturan status dan peran perempuan. Subordinasi, diskriminasi, atau marginalisasi perempuan yang muncul kemudian menunjukkan bahwa perempuan menjadi the second sex seperti juga disebut sebagai warga kelas dua yang keberadaannya tidak begitu diperhitungkan.

Kajian terhadap kekerasan seksual juga bukan merupakan kajian baru namun selalu menarik dan penting untuk dibahas. Sebab, persoalan hukum yang ada saat ini, kian rentannya perempuan menjadi korban kejahatan tersebut, menandakan ada ketidakmampuan hukum dalam memberantas ataupun menanggulangnya. Hukum selayaknya mampu hidup dalam masyarakat. “Hukum bukanlah teks yang berada di ruang kosong, hukum baru bisa bermakna bila ia “dibunyikan” dalam peristiwa peristiwa konkret yang ada dalam masyarakat, karena hukum memang berada dalam masyarakat.”

Artikel ini pada dasarnya ingin menggali bagaimana hukum yang ada, bekerja pada permasalahan konkret (khusus kasus yang bukan bagian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan bukan kasus anak) dan apakah kiranya perbaikan terhadap hukum yang ada penting untuk dilakukan. Dalam kompleksitasnya masalah kekerasan seksual terhadap perempuan, penulis akan fokus pada permasalahan yang terjadi, yaitu bagaimanakah penerapan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap perkara yang ada di Pengadilan Negeri Jambi?

C. Pembahasan

Pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP dapat dilihat dalam beberapa pasal yang dimuat dalam Buku Kedua Bab IV tentang Kejahatan Kesusilaan yang tertera dalam Pasal 281 KUHP- Pasal 295 KUHP. Adapun jenis perbuatan yang dimuat dalam bab tersebut secara singkat penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Pasal 281 tentang kejahatan melanggar kesusilaan
2. Pasal 282 tentang pornografi
3. Pasal 283 tentang tindak pidana dengan menggunakan tulisan, gambar atau barang, ditambah dengan alat untuk mencegah kehamilan atau menggugurkan kandungan
4. Pasal 284 tentang perzinahan

5. Pasal 285 tentang pemerkosaan
6. Pasal 286 tentang bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
7. Pasal 287 tentang bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan yang sepatutnya diduga umurnya belum lima belas tahun
8. Pasal 288 pemaknaan dari Pasal 287 ditambah jika mengakibatkan luka-luka
9. Pasal 289 tentang perbuatan cabul
10. Pasal 290 tentang perbuatan cabul dengan seseorang pingsan / tidak berdaya, atau seseorang yang umurnya belum lima belas tahun
11. Pasal 293 tentang penyalahgunaan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan
12. Pasal 294 tentang pencabulan dengan anak sendiri dan sebagainya

Dari rumusan yang dimuat dalam KUHP, secara garis besar klasifikasi kekerasan seksual terbagi atas pencabulan, perzinahan, persetubuhan, pornografi. Adapun yang menjadi klasifikasi kekerasan seksual terbatas pada perkosaan, pencabulan, persetubuhan. Dalam pengaturan tersebut, klasifikasi ini ditujukan bagi korban umum dan lingkup publik, sebab untuk kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga,

diatur dalam undang-undang khusus, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bagi korban anak, juga sudah diatur secara khusus dalam Undang- Undang

Nomor 35 Tahun 2 Negeri Jambi, dapat dilihat dalam sajian data berikut:

Thn	No	Pasal yang dilanggar	Ancaman Pasal	Putusan
2017	1	Pasal 351 KUHP	Pidana penjara 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah	Pidana Penjara 8 bulan
2018	1	Pasal 285 KUHP	Pidana penjara 12 tahun	Pidana Penjara 6 tahun 6 bulan
	2	Pasal 285 KUHP	Pidana penjara 12 tahun	Pidana Penjara 3 tahun 6 bulan
	3	Pasal 290 atau Pasal 378 KUHP	Pidana penjara 7 tahun / Pidana penjara 4 tahun	Pidana Penjara 4 tahun
	4	Pasal 290 KUHP	Pidana penjara 7 tahun	Pidana Penjara 4 tahun
2019	1	Pasal 285 KUHP	Pidana penjara 12 tahun	Pidana Penjara 10 tahun
	2	Pasal 293 (1) KUHP	Pidana penjara 5 tahun	Pidana Penjara 2 tahun 10 bulan
	3	Pasal 285 jo Pasal 64 (1) KUHP	Pidana penjara 12 tahun	Pidana Penjara 9 tahun

Dari data di atas dapat dicermati bahwa, angka kekerasan seksual yang terjadi di Kota Jambi tidak menunjukkan kuantitas yang besar. Justru tergolong

rendah. Namun cenderung meningkat pada tahun 2018. Dari aspek kualifikasi delik / tindak pidana, umumnya digolongkan dalam Pasal 285 KUHP tentang perkosaan, Pasal 290 KUHP perbuatan cabul dengan orang yang pingsan / tidak berdaya, Pasal 293 KUHP penyesatan memberi atau menjanjikan uang atau barang menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan orang yang belum dewasa berbuat cabul.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Mencermati pada tabel data dia atas, untuk perbuatan perkosaan, hakim menjatuhkan bervariasi antara 3 tahun penjara hingga 10 tahun penjara.

Selanjutnya, dalam Pasal 293 KUHP yang isinya:

(1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau

membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu

(3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Mencermati pada putusan hakim, bahwa dalam hal perbuatan penyesatan perbuatan cabul hakim hanya menjatuhkan 2 tahun 10 bulan, artinya setengah dari ancaman maksimal pasal. Menurut penulis, hal ini kurang relevan dengan akibat perbuatan pelaku terhadap korban.

Jika mencermati pada tindak pidana perkosaan, penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkosaan secara normatif tidak melanggar aturan, krn tidak melebihi batas maksimal ancaman pasal. Namun perlu dicermati bahwa delik perkosaan tidak dapat dipersamakan dengan delik yang lain. Perkosaan bukan sekedar tindakan yang dilarang dalam aturan KUHP sebagaimana tindak pidana yang lain, namun penegak hukum (hakim) harus dapat melihat ini dalam perspektif

perlindungan perempuan. Perkosaan tidak hanya melanggar aturan hukum tetapi lebih kepada pelanggaran integritas kehormatan perempuan. Dari keseluruhan perkara yang diputus oleh hakim, belum ada satupun perkara yang diputus dengan ancaman maksimal. Meskipun dalam fakta, pelaku terbukti bersalah. Pilihan hakim ini menurut penulis, belum memihak sepenuhnya terhadap perlindungan perempuan. “Merujuk pada pertimbangan yang meringkankan dan memberatkan, dapat dianalisis bahwa pemberian sanksi hukum faktor yang memberatkan jauh lebih besar dibandingkan yang meringkankan. Jika merujuk pada kenyataan tersebut idealnya sanksi hukum bagi pelaku perkosaan berada pada tingkatan berat.” Tanpa mengurangi penghargaan terhadap asas praduga tak bersalah, pertanyaan mendasar yang mengemuka, hal meringkankan apa yang digunakan hakim untuk tidak menjatuhkan ancaman maksimal.

Perspektif perlindungan perempuan kiranya penting dimiliki hakim, jika menelaah suatu perkara kekerasan seksual perempuan. “Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ,hakekatnya merupakan salah satu bentuk kekerasan menunjukkan kerentanan posisi perempuan dan atau

anak terhadap kepentingan seksual laki laki.” Identifikasi perilaku seorang pelaku perkosaan adalah hasrat seksual dan kekuasaan kendali perempuan sebagai sebuah objek.

Dalam hal pengaturan hukum, idealnya bukan hanya digolongkan pada persoalan susila seperti yang termuat dalam KUHP, namun tergolong kategori pelanggaran hak asasi. “Perkosaan ditempatkan sebagai contoh perbuatan kriminalitas yang melanggar HAM perempuan karena lebih memposisikan keunggulan diskriminasi gender, yang mengakibatkan perempuan sebatas diperlakukan sebagai objek pemuasan kepentingan biologis kaum laki-laki.”

Hal yang menarik dari kasus yang pernah diproses di Pengadilan Negeri Jambi, di tahun 2018 bahwa pelaku didakwa dan dituntut dengan pasal yang berbeda kualifikasi jenisnya. Jaksa mendakwa dan menuntut pelaku dengan Pasal 378 KUHP atau Pasal 290 KUHP. Sementara jika mencermati isi Pasal 378 KUHP: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun

menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Kemudian jika dibandingkan dengan Pasal 290 KUHP yang isinya: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Dalam hal ini, penulis tidak ingin mencermati perbedaan pasal tersebut. Karena memang telah jelas sangat berbeda. Namun penulis mencermati dari kronologi peristiwa dalam putusan, bahwa peristiwa yang terjadi pada kasus tersebut adalah mengandung beberapa bentuk perbuatan sekaligus. Pelaku

seorang dukun yang menjerat korban dengan cara mengiming imingi korban, dan meyakini korban, bahwa pelaku dapat melipatgandakan uang dari makhluk halus. Ritual yang digunakan cara memberikan minuman keras dan melakukan pencabulan dengan korban. Selain itu, korban juga justru harus membayar sejumlah uang atau mahar kepada pelaku. Perbuatan pelaku bukan hanya ada unsur penipuan, namun juga mengendalikan korban agar dapat dikuasai secara fisik dan psikis, agar berada dibawah pengaruh pelaku untuk dapat secara leluasa pelaku melakukan pencabulan yang sangat merugikan mental dan materil korban. Penulis menilai bahwa ada kekurangan yang mendasar dari pengaturan dalam KUHP, sehingga menimbulkan kegalauan terhadap penegak hukum untuk menerapkan hukum mana yang sesuai dan memenuhi rasa keadilan korban dan masyarakat. Keraguan ini memang beralasan sebab dalam Pasal 290 Ayat 1 KUHP hanya menyebutkan larangan melakukan pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya, sedangkan kasus ini tidak hanya memenuhi rumusan pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya, tetapi juga ada unsur penipuan yang dilakukan pelaku terhadap korban. tidak terakomodirnya perbuatan pelaku dalam rumusan ini,

merupakan salah satu gejala bahwa bentuk kekerasan seksual memiliki dimensi perbuatan yang beragam yang tidak hanya melulu yang dirumuskan dalam KUHP. Jaksa dalam hal ini, juga mengalami keraguan, dikarenakan minimnya jeratan pasal terhadap pelaku yang dimuat dalam KUHP, sementara perbuatan nyata dilakukan.

Selanjutnya, pada kasus tahun 2017, terdapat kasus yang juga menurut penulis kualifikasi perbuatannya tidak dirumuskan dalam KUHP. Pada kasus tahun 2017, pelaku yang bertetangga dengan korban berselisih paham disebabkan keluarag korban memarkir motor di jalan yang menyebabkan mobil pelaku agak sedikit terhalang untuk lewat. Dari kejadian tersebut, terjadi adu mulut pelaku dan korban. Namun anehnya pelaku justru melampiasikan amarah dengan menarik payudara korban dengan keras, sehingga korban mengalami kesakitan dan dibuktikan dengan visum dokter. Jika hanya melihat sekilas bahwa perbuatan pelaku tergolong kekerasan fisik / penganiayaan. Hal ini sesuai dengan dakwaan jaksa terhadap pelaku yaitu mendakwa dengan Pasal 351 Ayat 1 KUHP. Adapun isi Pasal 351 KUHP:

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun

delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Tidak ada yang keliru terhadap pasal yang didakwakan dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Namun, penulis berpendapat bahwa perbuatan pelaku tidak hanya memenuhi unsur kekerasan fisik namun juga mengandung unsur kekerasan seksual dan pelecehan. Dalam kaitannya tentang edukasi, tubuh adalah situs yang harus dihormati, yang tak pantas mendapatkan kekerasan dalam bentuk apapun. Sementara nilai penghargaan tersebut tidak dirumuskan dalam KUHP.

Ditinjau dari penegakan hukum, untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, penegak hukum berupaya memberikan kepastian hukum melalui aturan hukum yang ada saat ini yaitu KUHP, meskipun memiliki beberapa kelemahan. Dalam hal kekerasan seksual terjadi pada ranah

publik umumnya penegak hukum menggunakan aturan KUHP. Namun persoalan yang ada, dimensi perbuatan kekerasan seksual yang ada dalam KUHP belum mampu mengakomodir berbagai perbuatan pada yang terjadi. Kekosongan hukum yang ada, akan menimbulkan ketidakpastian dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Nilai perlindungan terhadap perempuan adalah nilai esensial yang harus dimiliki dalam aturan hukum terhadap perbuatan kekerasan seksual. Dan ini belum muncul dalam KUHP.

KUHP merupakan cermin yang paling terpercaya mengenai peradaban suatu bangsa (Hermann Mannheim dalam Andi Hamzah). KUHP harus mampu mengadopsi kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat. Prinsip nilai adalah hal yang paling fundamental yang harus dimiliki dalam sebuah undang-undang. Bahwa setiap negara memiliki perbedaan yang mendasar dalam memandang perbuatan kekerasan seksual. Ada negara yang longgar mengatur hal tersebut, seperti tidak melarang perzinahan yang ada sebagaimana diatur dalam KUHP Indonesia. Namun ada negara yang secara ketat mengatur hal tersebut. Bahkan ada negara yang mengatur perkosaan dalam bagian kejahatan terhadap badan orang, sama dengan penganiayaan, seperti di Negara

Cina. Karakteristik ini merupakan nilai masing-masing negara bagaimana memandang perbuatan tersebut. Dan yang paling penting bagaimana negara melihat aspek perlindungan terhadap perempuan.

Hukum yang dibentuk dalam suatu masyarakat tertentu akan memperlihatkan ciri-ciri khas, sesuai dengan situasi sosial ekonomi dan jiwa bangsa. Oleh karena itu hukum suatu masyarakat tertentu sepantasnya disebut hukum nasional. Memang hukum nasional harus dibentuk juga sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum. Namun penggunaan prinsip-prinsip ini tergantung dari rasa hukum jiwa bangsa dan kebutuhan konkret masyarakat.

Nilai sensitivitas perempuan yang pada akhirnya bermuara pada keadilan gender, kiranya penting diakomodir, terlebih Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung nilai ketuhanan dan nilai martabat manusia berdasarkan Pancasila. Sejalan dengan hal tersebut

dalam kerangka pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum

pidana yang dicita-citakan. Bukan pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Berbagai aturan saat ini salah satunya KUHP, merupakan aturan peninggalan kolonial Belanda yang masih bersifat diskriminatif, atau paling tidak belum sensitif gender. Bahkan dapat dikatakan belum mengenal kekerasan berbasis gender (gender based violence)

Berangkat dari hal tersebut sejatinya memang telah layak untuk negara, dalam hal ini pemerintah bersungguh sungguh dan berkomitmen mereformasi aturan yang ada, menuju aturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap perempuan yang berkeadilan dan bereferensi dari pengalaman perempuan sehingga hukum bukan sekedar teks kosong yang tidak berbunyi dan lemah dalam implementasi, namun hukum yang mengakar dan melindungi segenap kaum perempuan.

D. Penutup, bagian akhir dari tulisan.

Kekerasan seksual terhadap perempuan tidaklah sama dengan perbuatan pidana lainnya. Kekerasan seksual memiliki dimensi perbuatan yang luas dan beragam. Dari putusan yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Jambi, jenis kekerasan seksual umumnya

tindak pidana perkosaan dan pencabulan seperti yang termuat dalam KUHP. Dalam penjatuhan hukuman, belum ada satupun hakim menjatuhkan hukuman maksimal, meskipun dalam fakta persidangan terbukti bersalah. Dalam hal penerapan hukum, penegak hukum dalam hal ini jaksa dan hakim mempedomani KUHP, yang memang memuat pengaturan perkosaan dan pencabulan. Meskipun dalam tataran kenyataan kasus yang terjadi sebenarnya memiliki dimensi perbuatan yang beragam (lebih dari satu) dan layak untuk diberikan ancaman yang sesuai dengan perbuatan pelaku. Dalam hal ini, terjadi kekosongan hukum yang sebenarnya mengakibatkan ketidakpastian dalam pemenuhan rasa keadilan bagi perempuan (korban)

Bahwa dalam hal ini perlu komitmen negara untuk bersungguh sungguh mereformasi aturan hukum terkait kekerasan seksual terhadap perempuan. Pada kenyataannya bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan bukan sekedar perkosaan dan pencabulan namun lebih dari itu. Terkait dengan hal tersebut dapat dikatakan KUHP sudah sangat ketinggalan untuk dapat menampung berbagai bentuk kekerasan seksual. Reformasi aturan hukum penting dilakukan dengan menggali nilai dan prinsip kearifan

bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan juga mengakomodir prinsip perlindungan perempuan yang berkeadilan gender. Dalam penjatuhan

hukuman terhadap kekerasan seksual, hakim menilai fakta persidangan dengan perspektif perlindungan perempuan dan memaksimalkan ancaman bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama.

Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cetakan 1, Jakarta, Kencana Prenada Media.

Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan kedelapan, Yogyakarta, Kanisius, Yogyakarta.

Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan dan Hukum: Menuju Perspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia.

Abby Gina, Gadis Arivia, Kekerasan Seksual dan Simboli: Studi Kasus di Jakarta, Jurnal Perempuan, Volume 21 Nomor 2, 2016. (samakan tata tulis jurnal seperti ini)

Ani Purwanti, *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap*

Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012>

Atikah Rahmi, *Jurnal Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/1499>

Dede Kania, *Jurnal Konstitusi Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*.

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1243>

Harkristuti Harkrisnowo, *Jurnal Hukum "Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Sosio Yuridis"*, Nomor 14 Volume 7, 2000.

Irwan Abdullah, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Dyah Pitaloka, *Bias Gender Dalam Penanganan Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif*, <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/12285/0>

Nilia Sastrawati, *Hukum Sebagai Nilai Integrasi: Pertimbangan Nilai Keperawanan Dalam Kasus Perkosaan*

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1464

Prianter Jaya Hairi, 2015, *Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah*

Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction of Government Policy In Handling The Problems)

<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/243>

Witriyatul Jauhairiyah, Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

<https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan>

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf